

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi adalah perluasan kegiatan ekonomi melintasi batas-batas politik nasional dan regional dalam bentuk peningkatan gerakan barang dan jasa termasuk buruh, modal, teknologi, dan informasi melalui perdagangan.¹

Jika memahami makna yang terkandung dalam pengertian globalisasi tersebut maka, dapat dikatakan bahwa globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara diseluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas territorial negara sehingga globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Dari penjelasan mengenai globalisasi ekonomi tersebut nampak jelas bahwa globalisasi ekonomi telah menjadi fenomena yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap negara, sebab perekonomian dunia semakin terbuka dan mengarah pada suatu kesatuan global dimana lalu lintas barang dan jasa telah melewati batas-batas negara. Era globalisasi ekonomi ini, antara lain di tandai dengan ciri-ciri :

- 1). Memudarnya batas-batas antar bangsa, 2) lahirnya persaingan bebas dan ketat,
- 3) terbukanya pasar barang dan tenaga kerja, 4) lahirnya pranata baru sistem perdagangan, 5) lahirnya kekuatan ekonomi baru, 6) Lahirnya regionalisasi perdagangan seperti : a) world Trade Organization (WTO), b) Asia-European

¹ Rintuh , Cornelis dan Miar, M,S. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta : BPFEE 2005. Hal 116

Forum (ASEM), c) Nort America Free Trade Area (NAFTA), d) Asian Pasific Economic Cooperation (APEC), d) Asian Free Trade Area (AFTA)

Seiring perkembangannya, era pasar bebas diidentifikasi bahwa tingkat ekonomi global yang telah membawa sejumlah perubahan, diantaranya kemudahan melakukan hubungan dagang serta kerjasama ekonomi, namun dilain pihak ternyata hal tersebut tidak membawa keuntungan bagi sejumlah pihak. Sebab pada dasarnya, ekonomi global menciptakan integrasi ekonomi dan pasar serta hubungan antar negara yang semakin intensif bahkan cenderung terdapat enterdependensi dan pada perkembangannya, muncullah berbagai perubahan alur ekonomi, dimana perekonomian masing-masing negara akan dipengaruhi oleh negara lain.

Oleh sebab itulah globalisasi ekonomi telah ‘memaksa’ banyak negara untuk mengkaji kebijakan luar negerinya agar dapat terus memajukan kehidupan ekonomi masyarakatnya. Globalisasi ekonomi yang melanda dunia telah menyadarkan banyak pihak akan semakin pentingnya hubungan ekonomi dan perdagangan internasional. Dalam konteks ini, hubungan ekonomi antar negara dapat menjadi perekat hubungan politik dan menjadikan peran diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen penting dalam politik luar negeri dalam kaitannya untuk membina hubungan ekonomi dengan negara lain².

Fenomena globalisasi ekonomi tersebut sebenarnya telah memberikan gambaran kepada kita semua bahwa, saat ini perkembangan ekonomi duina

² *Optimalisasi Diplomasi Indonesia* : Tabloid Diplomasi No.40, Tahun IV, Tgl. 15 febuari- 14 maret 2011.Diraktorat Diplomasi Publik : Jakarta. 2011

khususnya di bidang perdagangan internasional telah memasuki fase perkembangan perdagangan bebas, dimana negara-negara di setiap benua telah membentuk blok-blok perdagangan bebas untuk meningkatkan kemakmuran bagi negara-negara yang terlibat, serta memiliki harapan agar mampu menciptakan suatu tatanan perekonomian yang stabil dan saling menguntungkan negara-negaranya masing-masing serta meningkatkan perdagangan diantara negara-negara dunia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah *Free Trade Agreement* (FTA) baik secara multilateral, regional, maupun bilateral. Secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2009 telah terdapat 450 FTA yang telah dintifikasi, sebagai contoh: Di benua Amerika terdapat sebuah kerja sama NAFTA yaitu bentuk kerjasama regional antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di benua Eropa terdapat kerjasama ekonomi yang lebih luas dengan terbentuknya sebuah kawasan ekonomi yaitu *European Union* (EU), *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) di kawasan Asia Tenggara dan ASEAN berkerjasama dengan China membentuk ASEAN-China Free Trade Area.

Sebagai sebuah kawasan perdagangan bebas, ACFTA bisa dikatakan merupakan region perdagangan bebas terbesar ketiga didunia setelah Uni Eropa (dengan 491 juta jiwa penduduk dan total PDB sebesar 14,38 triliun dollar AS) dan Amerika Utara (dengan 455 juta penduduk dan total PDB sebesar 15,85 triliun dollar AS). Dengan kata lain, kawasan perdagangan bebas ASEAN-Cina adalah pasar potensial, yang menggabungkan 1,9 milyar penduduk, dengan total PDB 6,6 triliun dollar AS, dan nilai perdagangan mencapai 4,3 triliun dollar AS.³

³ *ACFTA dan Ancaman Kedaulatan*. jurnal sosial demokrasi. hal 6

Diperkirakan dengan terbentuknya ACFTA akan menciptakan sebuah kawasan ekonomi dengan 1,7 miliar konsumen, Produk Domestik Bruto (PDB) regional sekitar US\$2 triliun dan perkiraan total nilai perdagangan mencapai US\$1,23 triliun. Penghapusan hambatan perdagangan antara ASEAN dan Cina diharapkan akan dapat memperkecil biaya produksi melalui skala ekonomi, peningkatan perdagangan intra regional dan meningkatnya efisiensi perekonomian⁴.

Kerjasama ASEAN- China FTA pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri China Zhu Rongji dalam ASEAN +3 Meeting di Singapura November 2000. Dan pada ASEAN-China Economic Cooperation Meeting pada Agustus 2001, China mengusulkan adanya perdagangan bebas dengan ASEAN dalam konsep The China-ASEAN Free Trade Area (ACFTA), yang di targetkan akan terwujud pada tahun 2010. Kesepakatan ACFTA ditandatangani bersama pada KTT ASEAN di Vientiane, Laos tahun 2001.⁵ Apabila ACFTA dapat diberlakukan dengan lancar, hambatan tarif dan non tarif akan dicabut dari 6 negara ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Pilipina, Singapura dan Thailand) pada 2010, dan dari negara CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) pada tahun 2015.⁶

Adapun tujuan dari pembentukan ACFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dan China yaitu menjadikan kawasan ASEAN dan China sebagai basis produksi pasar dunia untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN dengan China. Perjanjian ACFTA ini dilakukan dalam beberapa tahap, fase awal dari kesepakatan

⁴ Ibid.

⁵ Inayati, Ratna Shofi. 2011. *Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN : Sebuah Potret kerjasama*. Bab V *Tata Politik Dan Ekonomi Regional ASEAN-China* . Jakarta : Pustaka Pelajar. hal : 144-146.

⁶ ibid

perdagangan ini, dikenal dengan Program Panen Awal (EHP- *Early Harvest Programme*) yang telah dimulai 1 Januari 2004, fase kedua dikenal dengan Normal track yang dimulai implementasi penurunan tarifnya pada 1 Juli 2005, dan fase ketiga dikenal dengan istilah sensitive track yang akan dilaksanakan pada tahun 2012.

Dalam kesepakatan mengenai kerjasama Asean China Free Trade Area Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN yang juga mengimplemetasikan perjanjian ACFTA, dan keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan ACFTA ditandai dengan ditandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the ASEAN and China* oleh para kepala negara/kepala pemerintahan ASEAN dan China, di Phnom Penh, Vietnam. Pasca kesepakatan Phnom Penh, pada 24 November 2004 ditandatangani kesepakatan ACFTA di bidang barang, dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bidang perdagangan jasa yang disahkan pada 14 Januari 2007 dan kesepakatan di bidang investasi yang disahkan pada 15 Oktober 2009 di Bangkok, Thailand.⁷

Sebenarnya kesepakatan Indonesia untuk menerapkan *ASEAN-China Free Trade Area* atau ACFTA tersebut telah dirancang sejak lama dan ditandatangani 8 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 November 2002. Sedangkan jauh sebelumnya juga sudah dirancang dan disepakati *Common Effective Preferential Tariff* dalam rangka ASEAN Free Trade Agreement

⁷Syauta, Daniel E. *Pengaruh ASEAN- CHINA Free Trade Area (ACFTA) terhadap bisnis Indonesia dan Internasional.* tersedia dalam : <http://daniel36e.blogstudent.mb.ipb.ac.id/files/2011/08/Pengaruh-ACFTA-terhadap-Indonesia-dan-Internasional.pdf>. Di akses tanggal 8 maret 2012

(CEPT-AFTA), dan perjanjian tersebut telah ditandatangani 18 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 28 Januari 1992 dan di implementasikan di tahun 2010.⁸

Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan China memiliki dasar kemitraan strategis yaitu dengan dilatar belakangi oleh adanya kepentingan antar kedua negara. China merupakan negara Asia yang memiliki pengaruh besar dalam arus pasar global baik dari segi politik maupun ekonomi, terlebih lagi Indonesia bagi China adalah mitra strategis yang dapat diperhitungkan mengingat menjadi salah satu negara Asia yang mampu bertahan di tengah krisis global.

Indonesia sebenarnya menandatangani kesepakatan perdagangan bilateral dengan China pertama kali pada tahun 1953, dengan nilai awal perdagangan mencapai sekitar AS\$ 7,4 juta, dan secara konsisten meningkat hingga AS\$ 129 juta pada jangka waktu lima tahun setelah, namun hubungan diplomatis antara Indonesia dan China sempat berhenti pada tahun 1967 setelah munculnya apa yang disebut- sebut sebagai kudeta komunisme di Indonesia Pada bulan Desember 1989, atau satu dekade setelah adanya perbaikan hubungan bilateral diantara kedua negara, Indonesia dan China sepakat untuk membahas berbagai hal mengenai normalisasi hubungan bilateral kedua Negara. Selanjutnya, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, mengunjungi China pada tahun 1990, dan kedua pihak menandatangani Kesepakatan Penyelesaian kewajiban hutang Indonesia ke China (*Agreement on the Settlement Of Indonesia's Debt Obligation to China*) dan Komunike Pengadaan Kembali Hubungan Diplomatis antara China

⁸ Ibnu Purna. *ACFTA sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang Kompetitif*. Tersedia dalam http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4375&Itemid=29. Di akses tanggal 10 maret 2012

dan Republik Indonesia (*Communique on Resumption of Diplomatic Relations between People's Republic of China and the Republic of Indonesian*).

Setelah bertahun-tahun terhentinya hubungan diplomatis antara kedua negara, hubungan ekonomi antara Indonesia dan China mulai tumbuh kembali, khususnya setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU – *Memorandum of Understanding*) untuk pembentukan hubungan perdagangan antara kedua negara oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Dewan Promosi Perdagangan Internasional China (CCPIT – *China Council for the Promotion of International Trade*). Meskipun demikian , baru setelah masa normalisasi saja perdagangan antara kedua negara mulai meningkat secara tajam, meskipun dalam volume yang relatif kecil.

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan China juga semakin membaik bersamaan dengan milenium baru. China khususnya, mampu menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia Indonesia dan China melihat satu dengan yang lainnya sebagai mitra ekonomi yang potensial, Dari kacamata para pembuat kebijakan Indonesia, populasi penduduk China yang mencapai 1,2 milyar jiwa merupakan kesempatan ekonomi yang perlu digali.

Hubungan di antara Indonesia dan China mencapai puncaknya dengan ditandatanganinya kemitraan strategis (*Strategic Partnership*) pada April 2005 di Jakarta saat Presiden, China Hujianto, Berkunjung ke Indonesia dalam peringatan 50 tahun KAA di Bandung.kemitraan strategis ini mencakup kerjasama di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan serta sosial budaya dan kerjasama lainnya, setelah deklarasi bersama ini, hubungan kedua negara

berkembang pesat dan meningkatnya hubungan kerjasama tersebut ternyata memberikan keuntungan terhadap perkembangan ekonomi terhadap Indonesia, yakni antara periode 1999- 2007 Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan China, namun selama tahun 2008-2009, Indonesia mengalami defisit ini disinyalir karena banyaknya investasi dan proyek infrastruktur yang dibangun China di Indonesia pada periode 2008-2009, seperti pembangunan Jembatan Suramadu (Surabaya- Madura), proyek jalan, proyek Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) 10.000 Megawatt, yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia atas China menjadi negatif. Di tahun 2010 terjadi kelanjutan, tetapi minusnya menjadi berkurang di bandingkan dengan tahun sebelumnya.⁹

Bagi Indonesia, China tentunya merupakan salah satu negara yang mampu menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia bahkan China merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke-4 bagi Indonesia setelah Uni Eropa (UE), Jepang, dan Amerika Serikat (AS). dari kerjasama ekonomi yang dijalankan antara Indonesia dan China total ekspor non migas Indonesia ke China mengalami peningkatan antara 6,1 % menjadi sekitar 9,1 %, sedangkan impor Indonesia dari China di tahun 2004 sebesar 7,9 % dan melonjak naik di tahun 2009 sebesar 19,77 % dan dari hubungan ekonomi tersebut Indonesia dan China melihat satu dengan yang lainnya sebagai mitra ekonomi yang potensial, Dari kacamata para pembuat kebijakan Indonesia, populasi penduduk China yang mencapai 1,2 miliar jiwa merupakan kesempatan ekonomi yang perlu digali, di mana kedua negara juga

⁹Sinaga, Lidya Christin. *Indonesia di Tengah Kesepakatan ACFTA* : Jurnal LIPI. Tersedia dalam : http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/7210113_1829-8001.pdf diakses tanggal 2 agustus 2012

telah mempererat hubungan kerjasama ekonominya melalui keanggotaannya di dalam ASEAN melalui Implementasi kebijakan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)

Sejak perjanjian ACFTA mulai diberlakukan tentunya Negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia telah mempersiapkan diri dalam menghadapi peluang dan tantangan yang akan dihadapi, maka sebagai bagian dari keseriusan tersebut pemerintah mengawalinya dengan meratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.¹⁰ Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia telah siap dalam menghadapi ACFTA, namun kenyataan dilapangan berkata lain industri-industri sebagai penopang perekonomian Indonesia malah terkena dampak negatif dengan adanya ACFTA, akibatnya ekonomi Indonesia seakan jalan ditempat. Berdasarkan analisis dan perhitungan yang dilakukan oleh *Warta Ekonomi Intelegence Unit* ada delapan sektor industri di Indonesia yang terancam akibat implementasi ACFTA.¹¹ Kedelapan sektor itu ialah sektor alas kaki, sektor tekstil dan produk tekstil, sektor kimia, sektor besi dan baja, sektor furnitur, sektor elektronik, sektor makanan dan minuman. Sektor-sektor yang terancam ini membuat pasar domestik Indonesia kalah bersaing dengan produk impor yang terus membanjiri pasar domestik Indonesia, khususnya barang Cina¹² sehingga akibat yang di timbulkan dari hal

¹⁰ Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2004*, 15 juni 2004.(<http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/kp/2004/048-04.pdf>) diakses tanggal 22 November 2011 pukul 20.00 wita

¹¹ Ivan Lim dan Philipp Kauppert. "Apa Pilihan untuk Indonesia". *Jurnal Sosial Demokrasi-Perdagangan bebas ASEAN-Cina : Berdagang Untuk Siapa?*. 2010. vol.8, Februari-jun.

¹² Ibid

tersebut mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang. sebagai contoh harga tekstil dan produk tekstil (TPT) China yang lebih murah antara 15% hingga 25% dan tentunya membuat industri lokal kelabakan sehinga sangat memungkinkan bagi pengusaha lokal untuk bertahan hidup adalah bersikap pragmatis, yakni dengan banting setir dari produsen tekstil menjadi importir tekstil China atau setidaknya gejala inilah yang mulai tampak sejak awal tahun 2010.¹³

Dari latar belakang yang telah di jelaskan tersebut ternyata implementasi dari *ASEAN-China Free Trade Area* ternyata telah menyadarkan pemerintah untuk memperbaiki strategi didalam diplomasi ekonomi Indonesia.¹⁴ Hal tersebut di sebabkan karena banyaknya Industri dalam negeri yang justru kalah bersaing dengan produk-produk dari negara China, oleh karena dapat dikatakan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia yang masih lemah dan seringkali bahwa pola diplomasi ekonomi yang di bangun oleh pihak Indonesia kurang dipersiapkan dari segi detail dan kedalaman isu yang dihadapi, hal ini tentunya terlihat jelas dari hasil implementasi ACFTA. Dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan China, sektor Industri dalam negeri justru kalah bersaing dengan banyaknya produk-produk dari China yang harganya lebih murah dan cukup berkualitas.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia perlu lebih serius memikirkan pentingnya diplomasi ekonomi yang bersifat berkelanjutan dan jangka panjang.

¹³ Bintan. *ACFTA-Pasar Bebas 2010. Bunuh diri ekonomi Indonesia*. Tersedia dalam : <http://balancepers.com/acfta-pasar-bebas-2010/>. Di akses tanggal 9 juni 2012

¹⁴ Pernyataan Duta Besar Indonesia Ibrahim Yusuf untuk Thailand, . Lihat : *Optimalisasi Diplomasi Indonesia* : Tabloid Diplomasi No.40, Tahun IV, Tgl. 15 febuari- 14 maret 2011.hal : 5

Kecenderungan selama ini, diplomasi ekonomi Indonesia masih bersifat reaktif dan sporadis. Ketidakmampuan pemerintah menghasilkan perangkat diplomasi ekonomi yang utuh, komprehensif, dan berjangka panjang hanya akan menghasilkan berbagai output ekspor terbatas. Sebaliknya, jika pemerintah Indonesia dapat mengoptimalkan diplomasi ekonomi, hal itu akan berdampak amat signifikan bagi peningkatan kapasitas dan kapabilitas ekonomi nasional Indonesia yang kini sedang terpuruk.

B. Rumusan Masalah :

Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan peran diplomasi ekonominya untuk meningkatkan ekonomi nasional atas pengalaman dari hasil implementasi ACFTA ?

C. Kerangka Pemikiran :

Landasan teori pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan, serta memilih konsep maupun teori untuk menyusun hipotesa. Dengan melihat dari latar belakang dan untuk menjawab sementara dari pokok permasalahan yang ada, maka untuk mempermudah menjawab pertanyaannya penulis menggunakan konsep yaitu :

a. Konsep Diplomasi Ekonomi

Pengertian dari diplomasi menurut S.L Roy adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam hubungan dengan negara lain, apabila cara-cara damai gagal

untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.¹⁵

Sedangkan pengertian Diplomasi Ekonomi menurut Madan Kumar Dahal, dkk dalam bukunya "*Nepal: A Generic Guideline for Development through Economic Diplomacy*" menjelaskan mengenai pengertian diplomasi ekonomi yakni :

Economic diplomacy is the decision-making, policy-making and advocating business interests of the sending state. Economic diplomacy requires application of technical expertise that analyzes the effects of a country's economic situation on its political climate and on the sending state's economic interest. Economic diplomacy is concerned with economic policy issues. Economic diplomats also monitor and report on economic policies in foreign countries and offer advice to the home government on how best to influence them. Economic diplomacy employs economic resources, either as rewards or sanctions, in pursuit of a particular foreign policy objective. This is sometimes called 'economic statecraft'.¹⁶

(Diplomasi ekonomi adalah pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan dan tindakan pengiriman utusan negara untuk dukungan kepentingan bisnis. Diplomasi ekonomi memerlukan penerapan keahlian teknis guna menganalisis pengaruh situasi ekonomi suatu negara pada iklim politik dan tujuan utusan negara atas kepentingan ekonomi. Diplomasi ekonomi berkaitan dengan masalah kebijakan ekonomi. diplomat ekonomi dalam hal ini bertugas memantau dan memberikan laporannya tentang kebijakan ekonomi di luar negeri dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam negeri tentang cara terbaik untuk mempengaruhi mereka. Diplomasi ekonomi menggunakan sumberdaya ekonomi baik sebagai imbalan ataupun sanksi, untuk mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri yang objektif)

¹⁵ Roy, S.L., *Diplomacy*, di terjemahkan oleh Harwanto dan Mirsawati, Rajawali Press, Jakarta, 1995. Hal 5.

¹⁶ Dahal, Madan Kumar dan Sainju, Mohan Man dkk. 2008. *Nepal: A Generic Guideline for Development through Economic Diplomacy*. Institute of Foreign Affairs (IFA) : Kathmandu, Nepa. Hal 1.

Dari penjelasan di atas, diplomasi ekonomi pada intinya menekankan pentingnya upaya untuk memformulasikan dan mengatur kebijakan yang terkait dengan produksi, pergerakan dan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, atau sumber daya produksi lainnya dalam konteks hubungan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat terkait langsung dalam hubungan antar negara, maupun dalam konteks standar internasional dan tata cara peraturan dalam kerangka suatu organisasi internasional. Namun dalam pelaksanaan peran diplomasi ekonomi, pelaksanaannya sangatlah berhubungan dengan kondisi ataupun situasi yang terjadi di dalam negeri khususnya terkait dengan kondisi yang dapat mempengaruhi sektor ekonomi, sehingga diperlukan persiapan yang optimal bagi pemerintah ataupun stakeholder dalam membenahan dalam negeri sehingga bagi para pelaksana ataupun utusan negara yang menjalankan peran diplomasi ekonomi tersebut dapat memiliki nilai tawar yang tinggi dalam menjalankan peran diplomasi ekonominya dan mampu memberikan keuntungan bagi negaranya.

Dan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan peran diplomasi ekonominya menurut Prof. Dr. A.A. Banyu Perwita setidaknya ada tiga isu penting yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan peran diplomasi ekonominya yaitu; hubungan antara ekonomi dan politik, Kondisi ekonomi di lingkungan domestik sebagai basis instrumen kebijakan ekonomi luar negeri (*economic foreign policy*), serta hubungan antara aktor negara dan non-negara (aktor privat/swasta). Kombinasi ketiga hubungan

itulah yang akhirnya menjadi salah satu warna utama dinamika hubungan internasional kontemporer¹⁷

Isu pertama mengacu pada kondisi di tengah perkembangan intensitas dan kompleksitas yang kian tinggi dari tiga pola interaksi itu serta isu ekonomi global yang kian rumit, hubungan ekonomi dan politik kerap tidak dapat berjalan seiring. Banyak kasus menunjukkan, isu-isu politik menjadi penghambat hubungan atau diplomasi ekonomi yang dimiliki negara. Sebaliknya, ada banyak kasus terjadi, di mana hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain terbentuk secara efektif tanpa disibukkan hubungan politik yang mereka miliki. terkait isu pertama ini jika melihat hubungan diplomasi antara Indonesia dan China, hubungan kedua negara sempat terhenti di tahun 1953 akibat adanya persoalan politik mengenai permasalahan kudeta komunisme, dengan adanya kejadian tersebut mengakibatkan hubungan ekonomi di antara kedua pun sempat terhenti namun pada akhirnya di tahun 1989 kedua negara pun berinisiatif membuka hubungan diplomasi kembali khususnya di bidang perdagangan.

Kerjasama perdagangan yang dilakukan kedua negara kemudian mengalami perubahan dan membentuk sebuah kesepakatan yang terdiri dari beberapa negara dan membentuk sebuah area untuk perdagangan bebas yang dilaksanakan oleh negara-negara yang termasuk di dalam keanggotaannya. Negara-negara yang tergabung di dalam kerjasama ini akan membebaskan tarif bagi barang-barang yang masuk ke negaranya begitupun sebaliknya. Perdagangan yang dilakukan ini tentu saja telah berbeda dengan kerjasama yang hanya

¹⁷ *Optimalisasi Diplomasi Indonesia* : Tabloid Diplomasi Op.Cit. hal : 4

dilakukan oleh dua negara saja. Karena terdapat beberapa negara yang akan melakukan perdagangan didalam kesepakatan dan juga dalam jumlah ekspor dan impor pun jauh berbeda.

Dalam pelaksanaannya perdagangan bebas dalam sebuah area, akan saling bertukar barang yang juga merupakan keunggulan dari negara lain. Jika pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan keunggulan komparatif yang diharapkan, maka setiap negara dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari biaya ekspor ataupun impor. Hal ini disebabkan karna harga sebuah barang bergerak dari domestik ke wilayah dunia, yang mengalami kerugian akan mengurangi jumlah penjualan mereka sedangkan yang mengalami keuntungan akan semakin mendapatkan keuntungan akibat berkurangnya kuantitas dari pihak yang mengalami kekalahan. Sehingga keuntungan yang diperoleh melebihi biaya ekspor ataupun impor.

Perdagangan bebas memberikan manfaat lain bagi pelaku perdagangan maupun konsumen. Tiga manfaat yang diberikan perdagangan bebas yakni¹⁸ :

1. Perdagangan memupuk persaingan terbuka
2. Perdagangan mempromosikan pilihan konsumen, memberikan akses konsumen untuk melihat varian barang yang lebih banyak dari yang biasanya mereka beli
3. Perdagangan terbuka mengurangi kekurangan barang tertentu.

¹⁸ Griffiths. Martin and O'collaghan. Terry, *International Relation : The key concept*, London : Routledge.2002

Perdagangan bebas diyakini dapat memberikan manfaat dan keuntungan dari segi manapun, baik itu bagi negara, produsen maupun konsumen apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip perdagangan bebas. Dalam hal ini prinsip keunggulan komparatif tentu saja harus dilaksanakan. Dimana setiap negara harus memisahkan antara barang yang memiliki keunggulan yang tinggi dan yang rendah. Sehingga dapat terlihat barang yang akan di ekspor ataupun barang yang akan di impor dari negara lainnya. Sehingga terjadi kesetaraan dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Isu kedua merujuk tingkat ekonomi domestik sebagai basis instrumen kebijakan ekonomi luar negeri (*economic foreign policy*). Dalam konteks ini, tingkat kesiapan domestik yang rendah kerap menjadi kerikil dalam meningkatkan diplomasi ekonomi suatu negara. Hal ini dimaknai sebagai rendahnya kesiapan domestik suatu negara atau kerap dimaknai sebagai rendahnya daya saing negara di bidang ekonomi dan perdagangan dibandingkan negara lain. Alhasil, tingkat kesiapan domestik dan daya saing negara juga akan menentukan kapasitas dan kemampuan ekonomi nasional suatu negara dalam arena ekonomi dan politik global. namun dalam isu kedua ini jika melihat fenomena ACFTA, diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia dapat dikatakan cukup lemah sebab di implementasikannya kesepakatan ACFTA justru menyebabkan dampak negatif terhadap sektor ekonomi nasional, hal ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi ekonominya terkait dengan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China dalam kerangka ACFTA tidak memperhatikan kesiapan domestik sehingga untuk memperkuat kesiapan

domestik kembali dalam persaingan pasar bebas terkait pelaksanaan ACFTA pemerintah perlu mengambil langkah strategis salah satunya dengan memberlakukan instrumen non tarif sebagai upaya pengutan daya saing global terkait pelaksanaan pasar bebas ACFTA. Instrumen non tarif dapat menjadi upaya sebagai pengutan daya saing global dalam penerapan pasar bebas sebab dalam pelaksanaannya instrumen non tarif (*non tariff barrier*) merupakan proteksi yang menggunakan persyaratan - persyaratan bersifat teknis ataupun non teknis, salah satunya adalah menentukan jenis produk yang boleh masuk ke pasar. Sedangkan instrumen tarif (*tariff barrier*) merupakan proteksi yang menggunakan instrumen fiskal dengan pajak dan lain-lain¹⁹ atau merupakan hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu negara yang disebabkan oleh diberlakukannya tarif bea masuk dan tarif lainnya yang tinggi oleh suatu negara terhadap suatu barang, yang mengakibatkan harga jual barang tersebut di negara tujuan menjadi sangat mahal, sehingga menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan barang sejenis lain yang diproduksi dalam negeri negara tujuan²⁰.

Dalam pelaksanaan regionalisasi perdagangan bebas seperti ACFTA tentunya tidak diberlakukannya penerapan instrumen tarif (*tariff barrier*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan bentuk diskriminasi terhadap barang ekspor ataupun impor diantara negara-negara anggota sebab perdagangan internasional akan bekerja lebih efektif dan menguntungkan melalui pengurangan hingga penghilangan hambatan-hambatan berupa tarif dan non tarif. Pemikiran ini

¹⁹ Kalyani, Ahmad. Majalah Kompetensi. Edisi 25 tahun 2010. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia : Gedung KPPU. Jakarta Pusat.

²⁰ *Harmonisasi ketentuan anti dumping*, tersedia dalam : <http://ditjenkpi.depdag.go.id>. diakses tanggal 6 Desember 2012.

disetujui oleh negara-negara pada saat itu dan dituangkan dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947. GATT merupakan sebuah instrumen hukum sekaligus sebuah lembaga semu dalam mengatur perdagangan internasional dengan tujuan menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Hingga pada tahun 1994 akhirnya terbentuk sebuah organisasi nyata dalam perdagangan internasional yang dinamakan *World Trade Organization* (WTO) yang mengatur masalah perdagangan internasional.²¹

Isu ketiga terkait kemampuan negara dan swasta dalam hubungan ekonomi/perdagangan internasional. Semakin harmonis hubungan pemerintah (negara) dan swasta serta kian tingginya tingkat koordinasi hubungan antara aktor negara dan non-negara, akan berdampak positif terhadap efektivitas diplomasi ekonomi yang dimiliki. Sebaliknya, banyak kasus di negara berkembang, termasuk di Indonesia, menunjukkan, betapa lemahnya hubungan dan rendahnya koordinasi antara sesama institusi pemerintah dan swasta. Akibatnya, diplomasi ekonomi yang dimiliki bersifat sporadis dan tidak dapat secara efektif mencapai kepentingan ekonomi nasional, hal ini terjadi saat pemerintah mengimplementasikan ACFTA, dimana peran pemerintah yang seharusnya menjadi pintu masuk bagi para *stakeholder* untuk menyampaikan kepentingan, aspirasi, pemikiran, masukan, dan menjadi sumber informasi serta penentu posisi dalam menjalankan diplomasi ekonomi justru tidak berjalan maksimal sesuai dengan tugas yang seharusnya di jalani, sehingga dapat dikatakan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dalam implementasi ACFTA menjadi lemah dan

²¹ Elli Louka. *International Environmental Law – Fairness, Effectiveness and World Order*, (New York: Cambridge University Press, 2006), pg. 383.

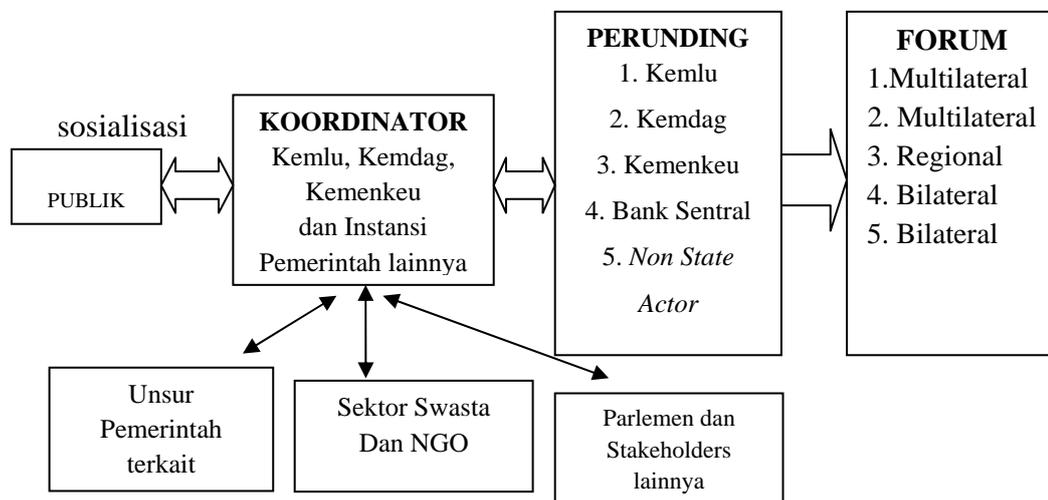
ACFTA pun sebaliknya justru menjadi ancaman bagi beberapa sektor ekonomi dalam negeri.

kerjasama ekonomi Indonesia dan China dalam kerangka ACFTA memang berjalan efektif, hal ini dapat kita lihat dari adanya hubungan perdagangan antara kedua negara yang sangat komprehensif namun dalam kerjasama ini, diplomasi ekonomi yang di jalankan oleh Indonesia menunjukkan adanya ketidak efektifan dalam kinerja diplomasi ekonomi yang di jalankan sebab tindakan diplomasi ekonomi Indonesia dalam mengimplementasikan ACFTA justru menjadi ancaman bagi sektor ekonomi nasional.

Melihat berbagai masalah tersebut salah satu isu yang perlu di kedepankan untuk mengoptimalkan peran diplomasi ekonomi untuk meningkatkan ekonomi nasional terkait hasil pelaksanaan ACFTA yakni pemerintah selaku aktor yang memiliki peran utama sebagai pelaksana diplomasi ekonomi dan memiliki peran koordinator dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi serta banyaknya aktor yang memiliki kepentingan dan berperan dalam diplomasi ekonomi membuat banyak negara merasa bahwa ujung tombak pelaku diplomasi yang umumnya Kementerian Luar Negeri harus diberi peran baru yang lebih luas. Dengan demikian, hal ini membutuhkan proses koordinasi atau koordinator yang kuat dalam menjalankan diplomasi ekonomi umumnya negara-negara yang tidak memiliki institusi khusus yang bertanggung jawab untuk masalah diplomasi ekonomi. Maka langkah pemerintah dalam mengatasi peran diplomasi ekonominya dalam menghadapi ACFTA adalah dengan membuat suatu forum atau tim konsultasi atau koordinasi khusus yang melibatkan seluruh pemangku

kepentingan. Tim atau forum tersebut biasanya bertugas untuk merumuskan posisi dan strategi nasional dalam melaksanakan diplomasi, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan *stakeholder*. Format seperti inilah yang diadopsi oleh Indonesia untuk melakukan koordinasi dalam menjalankan diplomasi ekonomi.²² Contoh bentuk atau kerangka kerja sebuah tim atau forum koordinasi tersebut dapat digambarkan seperti berikut :

Gambar 1.1: Kerangka Koordinasi Tim Diplomasi Ekonomi



Dari gambar tersebut di atas dapat dilihat bahwa peran koordinator menjadi sentral. Koordinator tidak saja menjadi pintu masuk bagi para *stakeholder* untuk menyampaikan kepentingan, aspirasi, pemikiran, dan masukan, namun juga menjadi sumber informasi serta penentu posisi dan target yang harus diperjuangkan oleh para perunding (negosiator). Selain itu, koordinator juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik dan *stakeholder*

²² Armanatha Natsir, Kesiapan Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Perdagangan Multilateral, dalam *Menjinakkan Metakuasa Global: Suara Indonesia untuk Globalisasi Yang Lebih Adil*, Imam Cahyono (Ed.), Pustaka LP3ES, Jakarta, 2008, hal. 163-164. Di kutip dalam tesis : Nafan, Muhammad . 2010. *Diplomasi Indonesia Dalam Perundingan Doha Development Agenda – Wto. Studi Kasus: Liberalisasi Sektor Pertanian*. Universitas Indonesia : Jakarta.

lainnya apa yang telah diperjuangkan dan dihasilkan dari proses diplomasi ekonomi yang dilakukannya. Dalam sistem semacam ini, selain kemampuan para perunding, keberhasilan dari sebuah diplomasi yang dilaksanakan berada pada kekuatan koordinasi dan kemampuan koordinator untuk menyaring, menerjemahkan, dan menyampaikan kepentingan *stakeholder* kepada para perunding.²³ maka jika di lihat dari peran penting tim diplomasi ekonomi tersebut upaya pemerintah dalam meningkatkan peran diplomasi ekonominya terkait persoalan ACFTA adalah dengan mencoba membentuk forum ekspor nasional yang diwujudkan melalui nota kesepahaman antara Kementerian Perdagangan dan KADIN No.538/M-DAG/MoU/4/2011 dan MoU/024/IV/2011 tentang pembentukan forum ekspor guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekspor seluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut sangat penting guna mempermudah langkah dan peran pemerintah selaku koordinator dalam melaksanakan diplomasi ekonomi serta mengontrol perkembangan ekspor nasional dimana yang melibatkan peran serta individu ataupun para pelaku usaha swasta sehingga pemerintah mampu memberikan masukan ataupun jalan kemudahan bagi mereka untuk mengembangkan ekspornya.

sebagaimana yang telah di jelaskan oleh penulis dari gambar 1.1 mengenai kerangka tim diplomasi ekonomi di atas serta merujuk pada pendapat Andri Gilang Nugraha, SE, M.Fin, dalam tulisannya “*Tantangan dan Peluang Serta Langkah-Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh ASEAN-CINA Free Trade Area (ACFTA)*” yang di muat dalam buletin

²³ Ibid

KPI yakni beliau berpendapat bahwa terdapat tiga aspek besar yang dapat dilakukan untuk menghadapi era pasar bebas yaitu dengan melakukan penguatan daya saing global, pengamanan pasar domestik, serta penguatan ekspor.²⁴

maka dari hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam mengoptimalkan peran diplomasi ekonominya yakni pemerintah dalam hal ini mencoba membentuk forum komunikasi ekspor Indonesia, hal ini sangat penting guna memperkuat daya saing dan nilai tambah ekspor seluruh daerah di Indonesia serta memfasilitasi segala hambatan yang dihadapi eksportir disisi lain dengan adanya forum eksportir ini diharapkan pemerintah selaku pemangku atas pelaksana diplomasi ekonomi agar mampu mendapatkan informasi dari pelaku usaha mengenai isu-isu penting yang menghambat ekspor maupun usaha-usaha peningkatan ekspor dan hubungan kerjasama pemerintah dan sektor swasta pun menjadi solid dalam meningkatkan ekonomi nasional khususnya ekspor nasional ke berbagai negara tujuan.

D. HIPOTESIS

Adapun upaya Indonesia dalam mengoptimalkan peran diplomasi ekonominya yakni dengan mengambil langkah-langkah yang strategis guna meningkatkan ekonomi nasional , antara lain :

- A. Pembentukan forum ekspor sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha
- B. Menerapkan Instrumen non tariff sebagai penguatan daya saing global atas produk dalam negeri

²⁴ Andri Gilang Nugraha, SE, M.Fin, “*Tantangan dan Peluang Serta Langkah-Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh ASEAN-CINA Free Trade Area (ACFTA)*”. Buletin KPI Edisi-02/KPI/2010.

E. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bentuk studi atau kajian pustaka (*library research*). Dengan menggunakan metode kualitatif akan dapat diperoleh data sekunder yang ditemukan dari buku-buku, makalah ilmiah, jurnal, majalah dan situs-situs internet juga sumber lain yang relevan dengan permasalahan.

F. Jangkauan Penulisan

Di sebabkan karena judul skripsi yang di pilih oleh penulis adalah “*Upaya Pemerintah Indonesia Mengoptimalisasi peran diplomasi Ekonomi Untuk Peningkatan Ekonomi Nasional : Pengalaman dari Implementasi ACFTA*” maka dari itu untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, penulis akan memfokuskan skripsi ini pada dampak kerjasama implentasi ACFTA antara ASEAN, Indonesia dan China terhadap ekonomi nasional, sehingga dari hal tersebut penulis mampus mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan peran diplomasi ekonominya untuk meningkatkan ekonomi nasional

G. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk menjelaskan upaya di lakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan peran diplomasi ekonominya atas pengalaman dari hasil implementasi ACFTA
- b. Memberikan tambahan wacana bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Hubungan Internasional mengenai persoalan- persoalan yang di hadapi dalam diplomasi ekonomi.

- c. Untuk melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi alasan pemilihan judul skripsi, tujuan penulisan skripsi, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II Dinamika Hubungan Perdagangan Indonesia-China dan Inisiasi ACFTA

Menjelaskan mengenai latar belakang Hubungan Perdagangan Indonesia-China dan terbentuknya ACFTA

BAB III Pelaksanaan ACFTA Di Indonesia dan Dampak Ekonomi Indonesia atas Implementasi ACFTA

Menjelaskan mengenai Pelaksanaan ACFTA di Indonesia, Serta dinamika Hubungan perdagangan Indonesia China dalam Kerangka ACFTA, serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi di Indonesia

BAB IV Upaya Pemerintah Indonesia mengoptimalkan peran diplomasi Ekonomi Untuk Peningkatan Ekonomi Nasional atas pengalaman dari hasil implementasi ACFTA

Menjelaskan mengenai strategi pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan peran diplomasi ekonomi atas pengalaman dari ACFTA.

BAB V Kesimpulan

Menjelaskan mengenai Kesimpulan yakni menjawab hipotesis yang telah diuraikan dalam BAB 1